



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KOTA BONTANG

**RENCANA KERJA (Renja)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA BONTANG
TAHUN 2022**

Bontang, Desember 2021

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (Satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Asistensi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) atas masukannya guna penyempurnaan laporan ini.

Bontang, Desember 2021
Kepala

Ir. Amiruddin, MP.
Pemimpin Utama Muda / IVc
NIP. 206505051993031013



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud Dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 5
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Bapelitbang Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Bapelitbang	 5
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
III.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bapelitbang	13
III.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	13
III.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	21
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 22
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 24
BAB V PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. Realisasi Anggaran Belanja Bapelitbang Tahun 2020	5
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang	6
Tabel 2.3. Strategi dan Kebijakan	9
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang	11
Tabel 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapelitbang 2021-2026	23
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bontang	25



BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) pada adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja PD mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD. Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan tahun berikutnya.

Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang tahun 2022 diawali dengan menyusun Rancangan Renja Bapelitbang yang berpedoman pada dokumen Renstra Bapelitbang tahun 2021 - 2026 dan diselaraskan dengan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2022. Setelah mendapatkan masukan hasil forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat kota maka terhadap rancangan Renja dilakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan ke dalam Rancangan Akhir Renja Bapelitbang Tahun 2022.

Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Bapelitbang dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kota Bontang, telah dilakukan pembahasan bersama dengan tim Verifikasi Renja PD yang meliputi:

- Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bontang berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
- Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bontang;



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

- Penyelarasan program dan kegiatan antar PD Kota Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bontang;
- Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Bapelitbang Kota Bontang.

Renja Bapelitbang Tahun 2022 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Bapelitbang Kota Bontang Tahun 2021-2026, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2022, serta memperhatikan Renja Bappeda Provinsi Kaltim 2022.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2022 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri No 21 TAHUN 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025;
- o. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
- q. Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
- r. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- s. Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2021 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2022.



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

I.3. Maksud Dan Tujuan

Renja Bapelitbang Kota Bontang tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bapelitbang Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bapelitbang Kota Bontang adalah:

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bapelitbang Kota Bontang selama tahun 2022.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Bapelitbang Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Bapelitbang

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang adalah menyusun konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah disusun program dan kegiatan strategis dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2020, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang melaksanakan **12** program dan **49** kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 12.081.781.335,00** terdiri dari Belanja Langsung yang penggunaannya terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar **Rp 6.243.477.839,00** dan anggaran Belanja Tidak Langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di lingkungan Bapelitbang Kota Bontang sebesar **Rp 5.838.303.496,00**. Adapun untuk realisasinya sebagai berikut :

Tabel 2.1
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020
Periode : 01 Januari - 31 Desember 2020

Nama Rekening	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Efisiensi (Rp.)
		Realisasi (Rp.)	(%)	
BELANJA DAERAH	12.081.781.335,00	11.431.023.495,00	94,61	650.757.840,00
Belanja Tidak Langsung	6.243.477.839,00	5.855.391.367,00	93,78	388.086.472,00
Belanja Langsung	5.838.303.496,00	5.575.632.128,00	95,50	262.671.368,00

Program dan kegiatan terealisasi dengan capaian penyerapan keuangan sebesar **94,61 %** dengan pencapaian fisik sebesar **100%**. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang

Kode Rekening	Uraian Program/kegiatan/objek, kegiatan	Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Target/Realisasi Pengeluaran (Rp.) tahun 2021		Target/Target dan Anggaran Berapapun Tahun Realisasi yang Anggaran (Rp.)				Realisasi/Target Porsi Tercapai						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Berapapun Porsi Berapapun Tahun 2021 Tercapai		Tingkat Capaian Kinerja dan Indikator Anggaran Berapapun Berapapun Tahun 2021 Berapapun Porsi	Keterangan
				Target	(Rp.)	Rencana 2021	RPJMD 2021	Rencana 2021	RPJMD 2021	1. Sifat		2. Sifat		3. Sifat		4. Sifat			
										Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)		
01	PROGRAM PENGALIHAN LOKASI PERUMPAHAN BUKAN KAMPUS/PAKSI/PAKSI		2021	000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000
01.1.01	kegiatan pemeliharaan lingkungan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2021	000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	
01.1.01.01	Pembelian alat dan bahan	jumlah pembelian alat dan bahan	2021	000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	
01.1.01.01.01	Pembelian alat dan bahan	jumlah pembelian alat dan bahan	2021	000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	
01.1.01.01.01.01	Pembelian alat dan bahan	jumlah pembelian alat dan bahan	2021	000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	
01.1.01.01.01.01.01	Pembelian alat dan bahan	jumlah pembelian alat dan bahan	2021	000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	
01.1.01.01.01.01.01.01	Pembelian alat dan bahan	jumlah pembelian alat dan bahan	2021	000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	
01.1.01.01.01.01.01.01.01	Pembelian alat dan bahan	jumlah pembelian alat dan bahan	2021	000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	
01.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembelian alat dan bahan	jumlah pembelian alat dan bahan	2021	000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	
01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembelian alat dan bahan	jumlah pembelian alat dan bahan	2021	000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	
01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembelian alat dan bahan	jumlah pembelian alat dan bahan	2021	000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000												



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

[illegible]



Keterangan: * = Kolom ini hanya diisi apabila Renja yang disusun adalah Renja PD tahun ke-4 atau tahun ke-5 dari periode Renstra PD.
 ** = Kolom ini hanya diisi untuk penyusunan Renja PD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

Dalam tahun anggaran 2021, pencapaian semua kegiatan sudah sesuai dengan target, dengan rata-rata capaian keuangan dan fisik kegiatan di atas 95%. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak yang harus diperbaiki dari sisi kualitas output dan hasil kegiatan, di antaranya:

- Keakuratan perencanaan dan penganggaran sehingga anggaran terserap optimal.
- Pemanfaatan dokumen-dokumen perencanaan dalam mendukung pencapaian target-target.
- Perencanaan matang pada kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga tepat sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
- Belum optimal dalam media publikasi data-data statistik daerah.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bapelitbang dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting Bapelitbang Kota Bontang dalam menghadapi berbagai tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Review Kedua Rencana Strategis Bapelitbang Kota Bontang tahun 2016-2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bapelitbang Kota Bontang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
(1)	(2)
Mengoptimalkan tata laksana dan budaya organisasi yang berorientasi hasil melalui penyusunan standar kinerja yang terukur	Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mewujudkan budaya organisasi yang berorientasi hasil dan mampu menghadapi tantangan dan perubahan ke depan
Meningkatkan potensi dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	Mendorong terbentuknya jabatan fungsional tertentu sesuai kebutuhan lembaga dengan memberikan



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

berkualitas baik yang diselenggarakan sendiri maupun dengan bekerjasama dengan lembaga/pihak lain.	kesempatan yang sebesar-besarnya kepada aparaturnya untuk mengikuti diklat fungsional dan diklat teknis
Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi yang akurat dan cepat untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan.	Peningkatan kualitas data pembangunan melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi serta pemantapan manajemen pengelolaan data
Mengoptimalkan peran Bapelitbang untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan dan hasil kajian yang dihasilkan.	Meningkatkan pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga pemerintah lain.
Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi perencanaan pembangunan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan
Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi secara efektif.	Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang berbasis teknologi informasi

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapelitbang dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Bapelitbang Kota Bontang digunakan Indikator Sasaran PD (IKU) yang sudah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Strategi Bapelitbang serta Indikator Pembangunan yang tertera di dalam RPJMD 2016-2021 Kota Bontang yang berkaitan dengan kegiatan Bapelitbang. Hal tersebut dilakukan mengingat SPM yang mengatur Urusan Perencanaan sampai saat ini belum ada. Adapun analisis kinerja pelayanan Bapelitbang Kota Bontang sesuai aturan tersebut di atas dapat disampaikan melalui tabel sebagai berikut :



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Capaian Kinerja Perangkat Daerah				Proyeksi Capaian 2021
		2016		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD	90%	-	92%	94%	96%	98%	100%	96,00	93,72	93,72	91,79	100,00
2.	Persentase akurasi data SIPD	90%	-	90%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	80,59	100,00
3.	Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	79,90%	-	80%	85%	90%	100%	100%	65,84	75,47	73,37	105,88	100,00
4.	Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	80%	-	80%	85%	90%	95%	100%	-	95,84	95,89	98,71	89,36
5.	Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	15%	-	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 15,5%	≥ 23,75%	≥ 24,5%	≥ 48%	≥ 28,25 %
6.	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	90%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/Sasaran RPJMD	80%	-	80%	85%	90%	95%	100%	63,00	59,09	90,91	96,24	100,00
8.	Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)	80%	-	85%	90%	95%	100%	100%	89,66	100,00	100,00	96,77	96,24
9.	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	57%	-	60%	65%	67%	69%	70%	65,07	66,03	80,00	73,14	70,00



II.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bapelitbang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif, proses *bottom-up*, dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecil

nya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Bapelitbang Kota Bontang yang membantu Walikota Bontang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangat menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Bontang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bapelitbang Kota Bontang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.



4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bapelitbang Kota Bontang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman tentang aturan-aturan Perundang-Undangan karena adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan sehingga berdampak pada perbedaan pemahaman dalam menentukan program-program pembangunan serta strategi dalam perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas yang akan berdampak pada kurang maksimalnya kualitas output yang dihasilkan;
3. Masih belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi yang akan berdampak pada keterlambatan output yang dihasilkan;
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga berdampak pada rangkaian perencanaan setelahnya, menjadi mundur waktu pelaksanaannya;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang akan berdampak pada kurang tepat sasaran kebijakan-kebijakan yang akan di ambil nantinya;

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja tahun 2021, maka harus membandingkan perencanaan kegiatan dalam rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan sehingga penentuan kegiatan akan sejalan dengan perencanaan yang termaktub dalam RPJMD Kota Bontang.

Berikut merupakan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisis Kebutuhan yang di tentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No.	Rancangan Awal RKPD 2022				Hasil Analisis Kebutuhan 2022			
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		10.750.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.613.418.045
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan		7.350.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.768.595.956
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat pemenuhan layanan administrasi keuangan	35 pegawai	7.350.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat pemenuhan layanan administrasi keuangan	35 pegawai	6.768.595.956
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian		225.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			900.522.005
1.2.1	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakelan dinas yang diadakan	3 pasang	180.000.000	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakelan dinas yang diadakan	3 pasang	179.522.005
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional	10 pegawai	45.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional	10 pegawai	721.000.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum yang sesuai fungsi		1.730.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.665.306.042
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	5 jenis	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	5 jenis	4.967.690
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	440.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	440.536.173
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik yang disediakan	11 jenis	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik yang disediakan	11 jenis	66.594.450
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak yang disediakan	8 jenis	65.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak yang disediakan	8 jenis	65.049.029
1.3.5	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	150 orang	15.000.000	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	150 orang	14.963.000
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	200 kali	1.125.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	200 kali	1.267.145.500
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 jenis	300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 jenis	-
1.4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	-



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

No.	Rancangan Awal RKPD 2022				Hasil Analisis Kebutuhan 2022			
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			889.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			887.282.962
I.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jumlah materi	900 bush	9.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jumlah materi	900 bush	9.000.000
I.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	16 orang	880.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	16 orang	858.282.962
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			485.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			391.736.050
I.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	25 unit	450.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	25 unit	356.750.050
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi perbintan	30 unit					
I.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	4 jenis	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	4 jenis	34.980.000
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah		895.400.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.147.037.862
II.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	543.800.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			800.437.802
		Jumlah komponen masyarakat yang ikut serta dalam proses perencanaan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir di dalam RKPD	17 komponen 92 usulan					
II.1.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah peserta koordinasi penelaahan dokumen	100 orang	15.675.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah peserta koordinasi penelaahan dokumen	100 orang	15.675.000
II.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Laporan pelaksanaan konsultasi publik	1 dokumen	11.500.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Laporan pelaksanaan konsultasi publik	1 dokumen	36.637.800
II.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah perangkat daerah	31 Perangkat daerah	17.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah perangkat daerah	31 Perangkat daerah	17.500.000



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

No.	Rancangan Awal RKPD 2022				Hasil Analisis Kebutuhan 2022			
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
E.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	300 orang	121.125.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	300 orang	121.124.802
E.1.5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan	3 Kecamatan	8.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan	3 Kecamatan	8.000.000
E.1.6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	375.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	301.500.000
E.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi	3200 data	141.500.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			141.499.800
E.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi	3200 data	50.000.000	Pembinaan dan Pemantapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah data dan informasi	3200 data	50.000.000
E.2.2	Pembinaan dan Pemantapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah data dan informasi	3200 data	21.000.000	Pembinaan dan Pemantapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah data dan informasi	3200 data	21.000.000
E.2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi	3200 data	70.500.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi	3200 data	70.499.800
E.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen capaian pembangunan	2 dokumen	205.100.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			205.099.800
		Jumlah dokumen yang dievaluasi	7 dokumen					
E.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	2 dokumen	75.100.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	2 dokumen	75.099.750
E.3.2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah jenis capaian program/kegiatan terkait SPM	5 SPM	45.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah jenis capaian program/kegiatan terkait SPM	5 SPM	44.999.050
E.3.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen laporan capaian pembangunan daerah	2 dokumen	85.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen laporan capaian pembangunan daerah	2 dokumen	84.999.050



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

No.	Rancangan Awal RKPD 2022				Hasil Analisa Kebutuhan 2022			
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggaran		328.100.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			328.038.850
II.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir	21 Perangkat Daerah	135.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			134.998.850
II.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPUPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Perangkat Daerah	20.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPUPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Perangkat Daerah	19.998.900
II.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	12 Perangkat Daerah	20.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	12 Perangkat Daerah	19.998.900
II.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	12 Perangkat Daerah	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	12 Perangkat Daerah	19.998.750
II.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah urusan pemerintahan yang disinergikan dan diharmonisasikan	10 urusan	15.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah urusan pemerintahan yang disinergikan dan diharmonisasikan	10 urusan	14.999.800
II.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPUPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	9 Perangkat daerah	15.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPUPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	9 Perangkat daerah	14.999.900
II.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi	9 Perangkat daerah	15.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi	9 Perangkat daerah	14.999.900
II.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring	9 Perangkat daerah	15.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring	9 Perangkat daerah	14.999.900
II.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah urusan pemerintahan yang disinergikan dan diharmonisasikan	13 urusan	15.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah urusan pemerintahan yang disinergikan dan diharmonisasikan	13 urusan	14.999.900



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

No.	Rancangan Awal RKPD 2022				Hasil Analisis Kebutuhan 2022			
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir	6 Perangkat Daerah	68.006.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			80.941.150
II.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4 Perangkat Daerah	12.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4 Perangkat Daerah	11.999.960
II.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	4 Perangkat Daerah	12.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	4 Perangkat Daerah	12.000.000
II.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	4 Perangkat Daerah	12.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	4 Perangkat Daerah	11.999.750
II.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah urusan pemerintahan yang dienerjikan dan diharmonisasikan	7 urusan	12.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah urusan pemerintahan yang dienerjikan dan diharmonisasikan	7 urusan	12.000.000
II.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	2 Perangkat Daerah	6.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	2 Perangkat Daerah	11.077.450
II.2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	2 Perangkat Daerah	6.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	2 Perangkat Daerah	7.288.000
II.2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	2 Perangkat Daerah	6.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	2 Perangkat Daerah	7.288.000
II.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah urusan pemerintahan yang dienerjikan dan diharmonisasikan	4 urusan	5.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah urusan pemerintahan yang dienerjikan dan diharmonisasikan	4 urusan	7.288.000
II.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir	6 Perangkat Daerah	125.100.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			173.068.890
II.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4 Perangkat Daerah	16.100.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4 Perangkat Daerah	16.099.700



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

No.	Rancangan Awal RKPD 2022				Hasil Analisis Kebutuhan 2022			
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi	4 Perangkat Daerah	10.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi	4 Perangkat Daerah	10.000.000
B.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur/Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring	4 Perangkat	13.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur/Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring	4 Perangkat	12.999.750
B.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah urusan pemerintahan yang diserjikan dan diharmonisasikan	3 urusan	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah urusan pemerintahan yang diserjikan dan diharmonisasikan	3 urusan	24.999.800
B.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4 Perangkat Daerah	12.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4 Perangkat Daerah	11.999.750
B.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi	4 Perangkat Daerah	12.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi	4 Perangkat Daerah	12.000.000
B.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring	4 Perangkat Daerah	12.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring	4 Perangkat Daerah	12.000.000
B.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah urusan pemerintahan yang diserjikan dan diharmonisasikan	4 urusan	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah urusan pemerintahan yang diserjikan dan diharmonisasikan	4 urusan	24.999.800
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase tindak lanjut hasil penelitian, Persentase keberlanjutan inovasi daerah	75% & 90,60%	3.617.500.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.369.362.900
IV.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Bidang penelitian yang dilaksanakan	3 bidang	2.706.500.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			1.054.073.450
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Kajian	1 kajian	200.000.000				
IV.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Kajian	1 kajian	200.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Kajian	1 kajian	200.000.000



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

No.	Rancangan Awal RKPD 2022				Hasil Analisis Kebutuhan 2022			
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IV.1.2	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kajian	1 kajian	200.000.000	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kajian	1 kajian	200.000.000
IV.1.3	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah data kajian dan peraturan yang dikelola	400 data	6.500.000	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah data kajian dan peraturan yang dikelola	400 data	6.499.800
		Jumlah data inovasi daerah	50 data			Jumlah data inovasi daerah	50 data	
IV.1.4	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi dan draft peraturan	1 rekomendasi	2.100.000.000	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi dan draft peraturan	1 rekomendasi	647.573.650
IV.3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			311.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			315.289.450
IV.3.1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Repikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah uji coba dan penerapan inovasi dan IPTEK	1 inovasi	50.000.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Repikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah uji coba dan penerapan inovasi dan IPTEK	1 inovasi	49.999.900
IV.3.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah diseminasi yang dilaksanakan	3 jenis	250.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah diseminasi yang dilaksanakan	3 jenis	254.289.750
IV.3.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	jumlah peserta diseminasi	50 org	11.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	jumlah peserta diseminasi	50 org	10.999.800
		Jumlah peserta sosialisasi	50 org			Jumlah peserta sosialisasi	50 org	
		TOTAL PAGU INDIKATIF		15.060.000.000				13.518.856.847



II.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD 2020 tahun 2021 terbagi dalam 4 bidang, yaitu: ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan dan aparatur, dan sarana prasarana wilayah. Pada umumnya usulan masyarakat masih berupa pembangunan fisik dan sebagian kecil lainnya berupa kegiatan ekonomi, sosial budaya, serta pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, dari 400 usulan prioritas pertama yang masuk dalam Musrenbang Kota, semuanya ditujukan kepada PD teknis terkait. Namun, mengingat fungsi Bapelitbang sebagai institusi perencanaan, maka menjadi tanggung jawab Bapelitbang untuk semaksimal mungkin mengakomodir usulan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dalam Renja 2021 terdapat kegiatan Koordinasi Forum Multi Stakeholder CSR Perusahaan dalam program Perencanaan Pembangunan. Melalui kegiatan ini, Bapelitbang melakukan sinkronisasi antara kegiatan pembangunan yang direncanakan (bidang infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya) dengan program CSR perusahaan di Kota Bontang.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan rumusan Program dan Kegiatan antara lain :

1. Terdapat pencapaian sasaran didalam RPJMD Misi I yang harus dilaksanakan oleh Bapelitbang, sehingga perlu untuk di tentukan Program dan Kegiatanannya.
2. Terdapat kebijakan dari Pusat dalam pelaksanaan kegiatan di daerah-daerah, sehingga mewajibkan daerah untuk menganggarkan.
3. Sebagai pencapaian Sasaran-sasaran di dalam Rencana Strategis yang sudah ditetapkan targetnya melalui beberapa Indikator Sasaran tersebut.
4. Terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi prasyarat dalam penyusunan dokumen lainnya.

Dengan terbitnya Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk Rencana Kerja 2022 Bapelitbang terdapat **4** program, **13** kegiatan dan **56** sub kegiatan dengan anggaran kegiatan sebesar **Rp 13.518.856.847,-**.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rencana	Program dan Kegiatan	Lokasi	Rencana Kegiatan/Sub Kegiatan			Penganggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2022 (Rp.)	Unit Kerja
						Indikator Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif dan inovatif	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan	Persentase tingkat ketercapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Bontang	3-01-02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapelitbang	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	persen	100	1.547.837.052	APBD Kota Bontang	931.135.000	Bidang PSP
			3-01-02-2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendataan	Bapelitbang	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	8	800.437.852	APBD Kota Bontang	570.752.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan
			3-01-02-2.01-02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bapelitbang	Jumlah dokumen penelaahan pembangunan daerah	Dokumen	2	15.870.000	APBD Kota Bontang	26.300.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan
			3-01-02-2.01-03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bapelitbang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	7	35.537.000	APBD Kota Bontang	21.880.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan
			3-01-02-2.01-04	Koordinasi Pelaksanaan Forum DPRD/Lintas SGPD	Bapelitbang	Jumlah Berita Acara Forum Peringkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	7	17.500.000	APBD Kota Bontang	28.200.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan
			3-01-02-2.01-05	Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota	Bapelitbang	Jumlah Berita Acara Musyawarah Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	271.126.852	APBD Kota Bontang	233.875.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan
			3-01-02-2.01-06	Pengumpulan Bahan Koordinasi Musyawarah Kecamatan	Bapelitbang	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	700	8.000.000	APBD Kota Bontang	8.320.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan
			3-01-02-2.01-07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapelitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJMD/RPMD/RPDR)	Dokumen	2	600.500.000	APBD Kota Bontang	280.000.000	Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan
			3-01-02-2.03	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapelitbang	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	data	3000	141.499.000	APBD Kota Bontang	147.185.000	Sub Bidang Data dan Litbang
			3-01-02-2.03-01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Bapelitbang	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berikut Perencanaan Pembangunan Daerah)	keputusan	2200	33.000.000	APBD Kota Bontang	50.000.000	Sub Bidang Data dan Litbang
			3-01-02-2.03-02	Pembinaan dan Pemertan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SGPD	Bapelitbang	Jumlah Orang yang Diikutsertakan Pembinaan Data dan Informasi	Orang	33	27.000.000	APBD Kota Bontang	21.840.000	Sub Bidang Data dan Litbang
			3-01-02-2.03-03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapelitbang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang disediakan	Buku	1	75.499.000	APBD Kota Bontang	75.340.000	Sub Bidang Data dan Litbang



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

Tajuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Penganggaran		Perkiraan Paga Tahun 2022 (Rp.)	Unit Kerja
						Indikator Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana		
			6.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapelitbang	Jumlah dokumen perencanaan yang direvisi	hal	7	225.000.000	APBD Kota Bontang	213.304.000	Subbid Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
			6.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bapelitbang	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	75.000.000	APBD Kota Bontang	70.204.000	Subbid Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
			6.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Daerah	Bapelitbang	Jumlah kerja sama daerah yang di koordinasikan pelaksanaannya	Kerja Sama	3	44.995.930	APBD Kota Bontang	40.800.000	Subbid Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
			6.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bapelitbang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	44.995.930	APBD Kota Bontang	40.800.000	Subbid Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
			6.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapelitbang	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	peran	100	388.238.850	APBD Kota Bontang	341.224.000	
			6.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bapelitbang	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	dokumen	2	134.995.850	APBD Kota Bontang	140.400.000	Subbid Pemerintahan dan Aparatur, termasuk Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang diserahkan	rekomendasi	18		APBD Kota Bontang		
			6.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPUPD, RPUMD dan RPMD)	Bapelitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPUPD, RPUMD dan RPMD)	Dokumen	2	22.995.800	APBD Kota Bontang	20.800.000	Subbid Pemerintahan dan Aparatur
			6.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bapelitbang	Jumlah Perangkat Daerah yang Diarungi Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	15	18.999.600	APBD Kota Bontang	20.800.000	Subbid Pemerintahan dan Aparatur
			6.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bapelitbang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	10.995.750	APBD Kota Bontang	10.800.000	Subbid Pemerintahan dan Aparatur
			6.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bapelitbang	Jumlah laporan hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	10.995.800	APBD Kota Bontang	10.000.000	Subbid Pemerintahan dan Aparatur
			6.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPUPD, RPUMD dan RPMD)	Bapelitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Di koordinir Penyusunannya (RPUPD, RPUMD dan RPMD)	Dokumen	2	14.995.800	APBD Kota Bontang	15.000.000	Subbid Pengembangan Sumber Daya Manusia



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Jumlah	Kefuasan Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Pembelian Paga Tahun 2023 (Rp.)	Unit Kerja
						Indikator Program (Output/Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sasaran	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
			5 01 03 2.01 06	Asisten Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapelitbang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	8	14.999.900	APBD Kota Bontang	15.600.000	Subsidi Pendanaan Sumber Daya Manusia
			5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapelitbang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	8	14.999.900	APBD Kota Bontang	15.600.000	Subsidi Pendanaan Sumber Daya Manusia
			5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapelitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJGRP/MD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	14.999.900	APBD Kota Bontang	15.600.000	Subsidi Pendanaan Sumber Daya Manusia
			5 01 03 2.03	Kewilayahan Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bapelitbang	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan dan SDA yang disusun	Dokumen	2	80.000.000	APBD Kota Bontang	10.730.000	Subsidi Eksternal, Subsidi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
						Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disetujui	rekomendasi	13		APBD Kota Bontang		
			5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	Bapelitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Disetujui Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	Dokumen	2	11.999.950	APBD Kota Bontang	12.480.000	Subsidi Eksternal
			5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Bapelitbang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Perangkat Daerah	8	12.000.000	APBD Kota Bontang	12.880.000	Subsidi Eksternal
			5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Bapelitbang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Laporan	8	11.999.750	APBD Kota Bontang	12.480.000	Subsidi Eksternal
			5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Bapelitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJGRP/MD pada Bidang Perencanaan	Laporan	1	12.000.000	APBD Kota Bontang	12.480.000	Subsidi Eksternal
			5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	Bapelitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Disetujui Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	Dokumen	2	11.017.450	APBD Kota Bontang	5.200.000	Subsidi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
			5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapelitbang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	8	7.288.000	APBD Kota Bontang	5.200.000	Subsidi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
			5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapelitbang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	8	7.288.000	APBD Kota Bontang	5.200.000	Subsidi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
			5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Strategi dan Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bapelitbang	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPJGRP/MD pada Bidang SDA	Laporan	1	7.288.000	APBD Kota Bontang	5.200.000	Subsidi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokal	Rencana Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2022 (Rp.)	Unit Kerja
						Indikator Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Sasaran	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana		
			5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bapelitbang	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	Dokumen	2	173.560.000	APBD Kota Bontang	132.104.000	Subbid Perencanaan Infrastruktur, Subbid Tata Ruang Dan Pertanahan
						Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan	Rekomendasi	8		APBD Kota Bontang		
			5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RPJRD)	Bapelitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disusun/Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RPJRD)	Dokumen	3	16.000.000	APBD Kota Bontang	16.000.000	Subbid Perencanaan dan Infrastruktur
			5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapelitbang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Rencanastrengas Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	8	10.000.000	APBD Kota Bontang	10.400.000	Subbid Perencanaan dan Infrastruktur
			5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapelitbang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencanastrengas Bidang Infrastruktur	Daerah	4	12.000.000	APBD Kota Bontang	12.520.000	Subbid Perencanaan dan Infrastruktur
			5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bapelitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dan Harmonis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	8	24.000.000	APBD Kota Bontang	24.000.000	Subbid Perencanaan dan Infrastruktur
			5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RPJRD)	Bapelitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Disusun/Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RPJRD)	Dokumen	3	11.999.999	APBD Kota Bontang	12.400.000	Subbid Tata Ruang Dan Pertanahan
			5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapelitbang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Rencanastrengas Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	8	12.000.000	APBD Kota Bontang	12.400.000	Subbid Tata Ruang Dan Pertanahan
			5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapelitbang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencanastrengas Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	8	12.000.000	APBD Kota Bontang	12.400.000	Subbid Tata Ruang Dan Pertanahan
			5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bapelitbang	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dan Harmonis Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	72.999.999	APBD Kota Bontang	76.000.000	Subbid Tata Ruang Dan Pertanahan



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokal	Kebijakan Kegiatan/Sub Kegiatan			Rencana Anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2022 (M)	Unit Kerja
						Indikator Program (Output/Outcome)	Sasaran	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
Meningkatkan Kinerja Kelitbang	Peningkatan hasil kelitbang dalam perencanaan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan	5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapelitbang	Persentase tindak lanjut hasil kelitbang	permen	100	1.366.342.900	APBD Kota Bontang	1.079.350.000	Bidang PSEP
			5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengajian Peraturan	Bapelitbang	Jumlah bidang kelitbang yang dilaksanakan	Kegiatan Kelitbang	2	1.024.073.400	APBD Kota Bontang	2.708.790.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan
			5 05 02 2.01 03	Facilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Bapelitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Umum	Laporan	2	300.000.000	APBD Kota Bontang	300.000.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan
			5 05 02 2.01 04	Facilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Administrasi Birokrasi	Bapelitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Administrasi Birokrasi	Laporan	2	300.000.000	APBD Kota Bontang	300.000.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan
			5 05 02 2.01 12	Penggiatan Data Kelitbang dan Peraturan	Bapelitbang	Jumlah data kelitbang dan Peraturan yang diterbitkan dengan baik	Laporan	2	6.400.000	APBD Kota Bontang	6.750.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan
			5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan dan dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bapelitbang	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan dan dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	1	647.573.450	APBD Kota Bontang	2.585.000.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan
			5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bapelitbang	Jumlah inovasi daerah	Inovasi daerah	100	319.269.400	APBD Kota Bontang	368.900.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan
	Penerapan teknologi inovatif	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Aplikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Aplikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bapelitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Aplikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	2	46.900.000	APBD Kota Bontang	380.000.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan
			5 05 02 2.04 03	Diseminasi, Jom, Proseminar dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Inovatif	Bapelitbang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi, Jom, Proseminar dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Inovatif	Laporan	2	104.288.150	APBD Kota Bontang	242.500.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan
			5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbang	Bapelitbang	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang	Laporan	2	12.909.000	APBD Kota Bontang	22.000.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan
			5 01 01	Program Peningkatan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bapelitbang	Persentase penerapan program peningkatan urusan pemerintahan daerah	permen	100	10.813.438.045	APBD Kota Bontang	11.379.000.000	Subbid Data, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang	Indeks kualitas layanan masyarakat	Adaptasi dan Inovasi Pelayanan Publik	5 01 01 2.02	Adaptasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Bapelitbang	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adaptasi dan inovasi daerah	pegawai PNS	35	8.708.880.000	APBD Kota Bontang	7.644.000.000	Seksistat
			5 02 03 2.03 01	Kelembagaan dan Tunjangan ASN	Bapelitbang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kelembagaan	25	6.768.568.000	APBD Kota Bontang	7.444.000.000	Subbid Umum dan Kelembagaan



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2022

Tajuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Kategori Kegiatan/Suku Kegiatan			Pagu anggaran		Pembelian Pagu Tahun 2022 (Rp.)	Unit Kerja
						Indikator Program (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
			8 01 01 00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapelitbang	Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji kepegawaian	pegawai	80	800.420.000	APBD Kota Bontang	725.500.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 02 01 00	Penyediaan Pakan Ternak dan Obat Ternak	Bapelitbang	Jumlah paket pakan ternak dan obat ternak	Paket	3	178.322.000	APBD Kota Bontang		Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 03 01 00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berkeahlian Tesis dan Jurnal	Bapelitbang	Jumlah Pegawai Berkeahlian Tesis dan Jurnal yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	28	721.800.000	APBD Kota Bontang	725.500.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 01 01 00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapelitbang	Jumlah jasa administrasi umum yang disediakan	kegiatan	8	1.885.106.043	APBD Kota Bontang	1.800.300.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			5 02 01 00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapelitbang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.887.880	APBD Kota Bontang	5.300.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 02 01 00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapelitbang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5	446.336.213	APBD Kota Bontang	467.600.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 02 01 00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapelitbang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	11	66.594.410	APBD Kota Bontang	62.400.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 02 01 00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Bapelitbang	Jumlah paket barang cetak dan pengiriman yang disediakan	Paket	17	85.546.629	APBD Kota Bontang	86.400.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 02 01 00	Asuransi Kesehatan Tim	Bapelitbang	Jumlah cakupan Asuransi Kesehatan Tim	Asuransi	1	14.811.000	APBD Kota Bontang	15.600.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			5 02 01 00	Peningkatan Fasilitas Kantor dan Kantor BOP	Bapelitbang	Jumlah sarana peningkatan fasilitas kantor dan Kantor BOP	Asuransi	180	1.267.141.500	APBD Kota Bontang	1.176.800.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 01 01 00	Peningkatan Jasa Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Bapelitbang	Jumlah jasa jasa peningkat urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jasa Jasa Peningkat	2	887.282.882	APBD Kota Bontang	886.900.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 01 01 00	Penyediaan Jasa Sifat Menyortir	Bapelitbang	Jumlah sarana penyediaan jasa sifat menyortir	Asuransi	1	8.300.000	APBD Kota Bontang	9.500.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 01 01 00	Penyediaan Jasa Penyortir Urusan Kantor	Bapelitbang	Jumlah sarana penyediaan jasa penyortir urusan kantor yang disediakan	Asuransi	12	638.381.982	APBD Kota Bontang	686.400.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 01 01 00	Peningkatan Barang Milik Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Bapelitbang	Jumlah jasa barang milik daerah yang disediakan	BMD yang disediakan		361.730.180	APBD Kota Bontang	504.400.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			8 02 01 00	Penyediaan Jasa Peningkatan, Pemeliharaan dan Aspek Kebersihan dan Kebersihan	Bapelitbang		Asuransi	20	336.750.250	APBD Kota Bontang	466.000.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
			5 02 01 00	Peningkatan Fasilitas dan Kebersihan dan Kebersihan	Bapelitbang		Jasa	2	34.390.000	APBD Kota Bontang	36.400.000	Subbag Urusan dan Kepegawaian
TOTAL PAGU ANGGARAN									13.216.856.847		15.721.780.000	



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang.

Rencana Kerja (RENJA) Bapelitbang Kota Bontang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bapelitbang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bapelitbang Kota Bontang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bapelitbang Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.